

Sidang Gugatan Ijazah Jokowi Ditunda Karena Pengacara Tak Bawa Surat Kuasa

JAKARTA (IM) - Sidang gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (18/10), ditunda.

Hakim Ketua Heneng Pujadi memutuskan untuk menunda sidang tersebut lantaran berkas perkara tim kuasa hukum Jokowi yang tidak lengkap. Dalam hal ini, tim kuasa hukum Presiden yang diwakili oleh jaksa pengacara negara dari Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung, belum membawa surat kuasa khusus.

"Surat kuasa khusus belum dapat kami serahkan dalam sidang ini karena masih dalam proses substitusi," ujar jaksa.

"Sehingga saya mohon majelis hakim dapat menghadirkan kembali pada sidang berikutnya," ujarnya menambahkan.

Maka majelis hakim menyatakan bahwa pihak Jokowi dianggap tak hadir karena pihak Jamdatun Kejaksaan tak membawa surat kuasa.

"Tergugat I secara hukum kami menyatakan belum hadir. Nanti akan kami panggil lagi. Tergugat II, III, IV sudah ada surat kuasanya tapi masih harus dilengkapi," papar Hakim Heneng.

Tidak hanya Jokowi yang digugat dalam perkara ini tapi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

"Jadi untuk sidang hari ini mumpung lengkapan mengenai legal standing masing-masing pihak belum lengkap maka sidang akan ditunda," ujarnya.

Diketahui Jokowi digugat perdata oleh Bambang Tri Mulyono. Gugatan itu bernomor 592/Pdt.G/2022/PNjkt.Pst dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.

Ia diduga menggunakan ijazah SD, SMP, dan SMA palsu saat mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. ● han

2 Polhukam

FOTO/ANT



PELAYARAN SATGAS KJK 2022 BERAKHIR

Komandan KRI Bima Suci-945 Letkol Laut (P) Muhammad Sati Lubis (tengah) bersama Palaklat KJK 2022 Letkol Laut (P) Ahmad Fahrabi (kiri) dan Palaksa KRI Bima Suci-945 Letkol Laut (P) Bambang Rudi (kanan) berada di atas KRI Bima Suci-945 saat akan bersandar di Dermaga Madura Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (18/10). Kapal layar latihan tersebut tiba di Surabaya setelah 91 hari pelayaran dalam rangka melaksanakan Pelayaran Diplomasi Duta Bangsa dan Satlat Kartika Jala Krida Taruna ALL angkatan ke-69 dengan rute pelayaran Surabaya, Jakarta, Singapura, Sabah (Malaysia), Tual (Maluku Tenggara), Australia (Townsville, Sydney, Cairns, Darwin), Bali dan Surabaya.

KPK Gandeng IDI Bentuk Tim untuk Pemeriksaan Kesehatan Lukas Enembe

Tim yang akan dibentuk IDI bukan hanya memeriksa Lukas Enembe, tapi juga berusaha menyembuhkan kesehatannya agar dapat diperiksa KPK.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pertemuan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan sejumlah pihak dalam rangka membahas pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE) di Jayapura. Dalam pertemuan tersebut, disepakati adanya pembentukan tim.

"Kita baru rapat, tim baru rapat kecil. Tapi, tim itu sudah

segera terbentuk. Nanti kalau sudah terbentuk, maka tim ini akan melakukan agenda kegiatan," kata Ketua KPK, Firlil Bahuri saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembentukan Desa Antikorupsi 2023 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (18/10).

Tim yang bakal dibentuk tersebut bukan hanya memeriksa Lukas Enembe. Melainkan juga, menyembuhkan kesihat-

an Lukas agar dapat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

"Melakukan untuk memastikan dan sekaligus membantu pemulihan kesehatan para pihak yang keterangannya dibutuhkan oleh KPK, terutama terhadap hak-hak tersangka harus kita penuhi. saya kira itu ya," ungkapnya.

Untuk diketahui, tim kuasa hukum serta dokter pribadi Lukas Enembe sempat bertemu dengan penyidik KPK yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Brigjen Asep Guntur Rahayu, Senin (17/10). Pertemuan itu, dalam rangka membahas kondisi kesehatan Lukas Enembe.

Tim kesehatan dari IDI

rencananya akan berangkat ke Jayapura untuk memastikan kondisi kesehatan Lukas Enembe dalam waktu dekat. Dokter KPK, IDI, dan dokter pribadi Lukas Enembe bakal membahas lebih detail teknis pemeriksaan Lukas di Jayapura.

Lukas sempat menjalani tes kesehatan oleh tim dokter pribadi dari Singapura. Hasilnya, Lukas disebut mengalami kelemahan pada ekstrasitabitas atau gangguan gerak dan bicara. Sebab itu, direkomendasikan agar Lukas di MRI di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, ditetapkan sebagai tersangka karena terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi. Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail siapa saja yang jadi tersangka

serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.

Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut. ● han

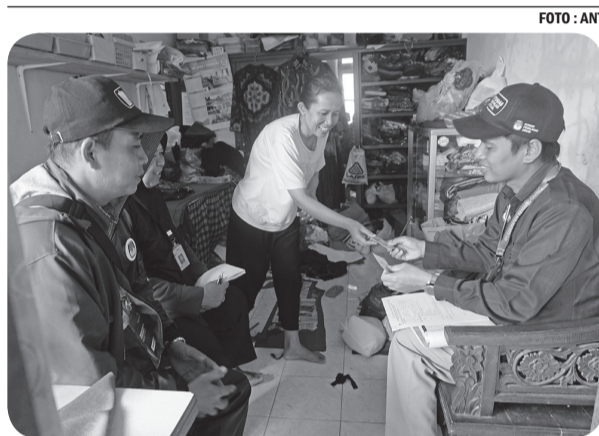


FOTO:ANT

VERIFIKASI KEANGGOTAAN PARCH DARI RUMAH KE RUMAH

Tim Verifikator KPUD dan Bawaslu kabupaten Temanggung melakukan verifikasi keanggotaan PARCH dari rumah ke rumah di Walitelon, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (18/10). Verifikasi keanggotaan bagi parpol nonparlemen dilakukan untuk memastikan kebenaran nama yang terdaftar pada situs resmi KPU <https://sipol.kpu.go.id> dengan orang yang bersangkutan.

Dea Jauh-jauh Datang dari Surabaya ke PN Jaksel untuk Dukong Richard Eliezer

JAKARTA (IM) - Dea merupakan salah satu dari beberapa orang yang sengaja datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (18/10), hanya untuk memberi dukungan terhadap Richard Eliezer atau Bharada E, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J.

Sidang yang digelar pada Selasa (18/10) merupakan sidang perdana yang dijalaninya oleh Bharada E terkait perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Sidang tersebut beranggotakan pembacakan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang dimulai pukul 10.00 WIB.

Dea dan ketiga temannya, juga perempuan, telah datang sebelum sidang dimulai. Ia mengaku sebagai fans dari Bharada E untuk memberi dukungan.

Dea mengaku tergabung dalam fans Bharada E bernama Richlifams.id dari Jabodetabek, tapi tiba di PN Jakarta Selatan dari Surabaya, Jawa Timur.

"Itu (Richlifams.id) itu fans Richard Eliezer di Indonesia kebetulan ini yang hadir (di PN Jaksel) dari Jabodetabek sama dari Surabaya," ucap Dea saat ditemui wartawan di PN Jakarta Selatan. Dea dan ketiga temannya yang datang tampil nyentrik.

Dea membawa bucket bunga dan pakai kaos hitam bertuliskan #SAVEBHARADAE serta spanduk dukungan. Kedatangan Dea dan ketiga temannya yang berbeda dari pengunjung PN Jakarta Selatan menjadi perhatian banyak orang.

"Kedatangannya ke sini karena Richard satu kampung sama aku. Jadi sama-sama dari Manado, kita respect kalo misalnya

dia mau jujur," kata Dea. Dea mengaku, masih banyak yang mendukung Bharada E selain ia dan ketiga temannya. Dea dan rekan-rekannya mendukung Bharada E sejak peristiwa pembunuhan berencana Brigadir J. Diungkapkannya, "Supaya bisa tahu kronologi waktu itu gimana supaya kita bisa tahu nanti hukuman dia gimana ke depannya," ucap Dea.

Dea berharap, Bharada E bisa bebas. Namun ia dan teman-temannya menyerahkan soal keputusan tersebut kepada hakim dalam persidangan.

"Harapan kita sih dia bisa bebas tapi terserah gimana nanti Tuhan berkehendak," ucap Dea. Sidang perdana terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Bharada E digelar di PN Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (18/10). Sidang Bharada E digelar dengan agenda pembacaan dakwaan dimulai sejak pukul 10.00 WIB dan selesai sekitar pukul 11.20 WIB.

Sedangkan Bharada E tiba di PN Jaksel sekitar pukul 08.33 WIB dengan didampingi penasihat hukumnya, Ronny Talapesa. Saat tiba, Bharada E mengenakan kemeja putih dan rompi tahanan kejaksaan.

● mei

Bambang Pacul Dilaporkan ke MKD Terkait Pemecatan Hakim MK Aswanto

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto yang akrab dipanggil Bambang Pacul, dilaporkan seseorang ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Karena pemecatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR, Aswanto pada akhir September 2022 melalui Rapat Komisi III DPR dan disahkan di Rapat Paripurna DPR.

Pengaduan ini diterima pada 7 Oktober 2022 lalu, sementara surat pengaduan diterima oleh Sekretariat MKD DPR pada Selasa (18/10).

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Shevierra Danmadiah mengatakan, alasannya melaporkan Bambang Pacul karena dia melihat adanya dugaan intervensi yang dilakukan DPR terhadap MK dengan cara mengganti Hakim MK Aswanto.

"Kami lihat ada dugaan intervensi yang dilakukan DPR terhadap MK dengan cara ganti Aswanto," kata Shevierra saat dihubungi, Selasa (18/10). Alasannya pencopotannya tersebut sangat mencengangkan. Pasalnya, Aswanto sering menganulir undang-undang produk DPR. Padahal, ada syarat seorang hakim MK dapat diberhentikan.

"Alasannya mencengangkan, Aswanto sering anulir

produk DPR. Padahal undang-undang hakim MK diberhentikan ada beberapa syaratnya," terangnya.

Oleh karena itu, Shevierra menegaskan bahwa keputusan pemecatan Aswanto sebagai Hakim MK ini cacat hukum. Dan dalam Kode Etik DPR, pemecatan itu jelas pelanggaran etik.

"Ini cacat hukum. Peraturan DPD tentang kode etik, pernyataan tersebut mengandung pelanggaran etik," tutup Shevierra.

Seperti diketahui DPR tiba-tiba mengganti Guntur Hamzah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, saat Rapat Paripurna DPR, Senin (29/9) lalu.

Pemecatan Guntur Hamzah diputuskan berdasarkan hasil rapat Komisi III DPR yang dilakukan pada Senin (29/9) pagi hari, di mana ada 5 (lima) fraksi setuju, 1 (satu) fraksi menerima dengan catatan, 1 (satu) fraksi menolak, dan 2 (dua) fraksi tidak hadir.

Sementara menurut anggota Komisi III DPR Habiburrahman, Komisi III DPR hanya menindaklanjuti surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengkonfirmasi perihal kelanjutan 3 hakim konstitusi usulan DPR yakni,

Arief Hidayat, Aswanto dan Wahidudin Adams, hingga akhirnya memutuskan untuk mengganti Aswanto dengan Guntur tanpa ada penjelasan lebih lanjut.

"Ya kurang lebih kan ada surat dari MK, mengkonfirmasi 3 hakim yang ditunjuk DPR itu, tentu MK menemukannya tindakan hukum dengan mengingkari surat konfirmasi ke DPR, maknanya tadi kami bersikap yaitu 3 hakim MK tersebut yang 2 tetap, yang satu Aswanto digantikan Profesor Guntur Hamzah," kata Habiburrahman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang dikutip Jumat (30/9/2022).

Saat ditanya alasannya, politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa putusan itu didasarkan pada surat MK tersebut, yang diterima DPR pada pekan lalu. "Ya itu, berdasarkan surat MK itu, MK berkirin surat kepada kami. Ya itu kami jawab," terangnya.

Terkait adanya isu beda penafsiran terkait Surat MK, Habiburrahman mengakui ada dialog dalam rapat Komisi III DPR, namun akhirnya ada keputusan yang sudah disahkan di Rapat Paripurna DPR.

"Enggak (ada beda tafsir), emang ada dialog, kan pada akhirnya diputuskan, itu akhirnya menjadi keputusan," ujar Habiburrahman. ● mei



FOTO:ANTARA

SOSIALISASI PENGAWASAN SIBER DALAM PEMILU

Direktur Lingkaran Madani Ray Rangkuti (kiri) memberikan pemaparan pada sosialisasi pengawasan siber dalam pemilu di Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/10). Sosialisasi pengawasan siber dalam pemilihan umum yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut diikuti oleh berbagai pegiat media yang ada di Jawa Barat guna persiapan pengawasan pemilu pada 2024 mendatang.

Demokrat: Pola Pikir Anies Selaras dengan AHY dan Partai Demokrat

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Anies Baswedan memiliki pola pikir yang selaras dengan Partai Demokrat dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait kriteria calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies. Sementara Anies disebut sudah mematok tiga kriteria cawapres yang akan mendampingi di Pilpres 2024.

"Pola pikir Anies ini selaras dengan Demokrat dan Ketum AHY," ujar Herzaky keada wartawan, Selasa (18/10).

Menurut Herzaky, Anies dan AHY sama-sama lebih fokus kepada kriteria yang harus dimiliki oleh seorang cawapres. Adapun AHY pernah mengamini dirinya menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies.

"Kita fokus pada kriteria, bukan nama, bukan sosok, lalu dibedakan bersama-sama secara seksama," katanya.

Herzaky menekankan, Partai Demokrat tidak akan terburu-buru dalam mengusung seseorang untuk maju di Pilpres 2024. Apalagi, kata Herzaky, jika sosok tersebut memiliki elektabilitas yang rendah.

"Dan tidak bakal punya kontribusi dalam membangun koalisi," ujar Herzaky.

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan tiga kriteria untuk memilih figur calon wakil presiden (cawapres).

Seperti diketahui bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membeberkan Anies untuk mencari cawapresnya sendiri.

"Satu, memberikan kontribusi dalam kemenangan. Kedua, membantu memperkuat koalisi, stabilitas koalisi. Ketiga bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif," papar Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (17/10).

Namun, ia tak mau terburu-buru menentukan pilihan. Anies merasa masih banyak

waktu sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran pasangan calon (paslon) capres-cawapres 19 Oktober 2023. Selain itu, ada Partai Nasdem belum membentuk koalisi dengan partai politik (parpol) lain.

"Proses pembentukan koalisi masih berjalan," ucapnya. Oleh karena itu, ia masih perlu melalui serangkaian proses sebelum menentukan menentukan siapa figur cawapres yang dipilihnya.

"Saya rasa akan lebih bijak apabila proses penentuan pasangan itu dilakukan dengan seksama dan bukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Anies.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berpendangan, sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan selaku calon presiden (capres), hendaknya berasal dari luar partai koalisi, misalnya dari Nasdem-Demokrat-PKS. Namun, Ali menegaskan bahwa Nasdem tetap menghormati mekanisme di internal PKS dan Demokrat.

"Partai Nasdem juga memiliki pandangan bahwa sebaiknya kita ambil (cawapres) dari luar partai koalisi," kata Ali saat dihubungi, Selasa (18/10).

Alasannya, kata Ali, jika partai mendorong tokoh sendiri dari internal untuk menjadi cawapres, langkah ini berisiko merugikan koalisi yang dibangun. "Kalau kemudian, tiga partai, calon wapres satu. Umpamanya partai A, partai B bagaimana Enggak dapat apa-apa kan?" kata Ali.

Atas hal tersebut, Nasdem tidak ingin hak politik mengusung capres maupun cawapres hanya terpaku pada kader internal masing-masing partai. Menurutnya, tentu partai perlu melihat sosok lain di luar partai yang berpotensi diusung sebagai capres maupun cawapres.

"Artinya apa, kita ingin mengatakan tidak selamanya kader partai politik seperti dikatakan ketua-ketua umum partai yang berhak maju sebagai presiden itu harus dari politik kan," katanya. ● mei